

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DI KABUPATEN KAMPAR

*Disusun dan Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau*



Oleh:

NURHASANAH
175310035

PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar”**.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan, namun walaupun demikian usaha yang maksimal telah penulis lakukan dalam penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayah H. Lukman dan Mama Hj. Rosmi yang telah membesarkan dan mendidik penuh kasih sayang serta keikhlasan dan juga seluruh pengorbanan yang tak terhingga dan tidak ada suatu hal apapun yang dapat membalas apa yang mereka berikan. Penulis hanya memohon kepada Allah SWT semoga Ayah dan Mama panjang umur dan selalu diberi kesehatan, kebahagiaan dan kemuliaan dunia dan akhirat. Penulis juga berterima kasih kepada Abang pertama Irwan Syahputra, S.H. dan Abang kedua Alm. H. Dedi Susanto yang selalu menyayangi penulis.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini juga tidak lepas dari dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, S.H., M.C.L. selaku Rektor Universitas Islam Riau.

2. Bapak Dr. Firdaus AR, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau dan juga selaku pembimbing saya yang telah memberikan pengarahan dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Hj. Siska S.E., M.Si., Ak., CA selaku ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan dan memberikan pelayanan yang baik mulai dari tingkat awal sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
5. Sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu memberikan dukungan, motivasi, bantuan dan kesetiaan menemani penulis di saat kuliah dan menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan bersyukur kepada Allah SWT yang telah memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan semoga bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian.

Pekanbaru, 4 Mei 2021

Penulis

NURHASANAH

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi keuangan daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan pada bagian keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara langsung dan dokumentasi atau memfotocopy data keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu dengan cara membandingkan antara praktek dan teori yang ada dan kemudian ditarik suatu kesimpulan untuk disajikan dalam bentuk skripsi.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi keuangan daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar belum sepenuhnya berpedoman dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

Kata Kunci: Akuntansi Keuangan, Akuntansi Keuangan Daerah, Prinsip Akuntansi Berterima Umum

ABSTRACT

This study aims to determine the suitability of the application of regional financial accounting at the Regional Disaster Management Agency in Kampar Regency with Generally Accepted Accounting Principles.

This research is a research conducted at the financial division of the Regional Disaster Management Agency in Kampar Regency. Types and sources of data used are primary and secondary data. The technique of collecting data from this research is by conducting direct interviews and documenting or photocopying financial data at the Regional Disaster Management Agency in Kampar Regency. In the preparation of this research, the writer used a descriptive method, namely by comparing the existing practice and theory and then drawing a conclusion to be presented in the form of a thesis.

Based on the research results, it can be concluded that the application of regional financial accounting at the Regional Disaster Management Agency in Kampar Regency has not been fully guided by the Generally Accepted Accounting Principles.

Keywords: *Financial Accounting, Regional Financial Accounting, Generally Accepted Accounting Principles*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	11
2.1 Telaah Pustaka.....	11
2.1.1 Pengertian Akuntansi.....	11
2.1.2 Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah.....	12
2.1.3 Perbedaan Sektor Publik dengan Sektor Swasta	13
2.1.4 Tujuan Laporan Keuangan	13
2.1.5 Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah	14
2.1.6 Asumsi Dasar Akuntansi Keuangan Daerah	16
2.1.7 Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan	17
2.1.8 Siklus Akuntansi Keuangan Daerah	19
2.1.9 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	22
2.1.10 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	24
2.1.11 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.....	25
2.1.12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.....	27
2.1.13 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011	28
2.1.14 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013	30

2.2	Hipotesis	31
BAB III	METODE PENELITIAN	32
3.1	Desain Penelitian	32
3.2	Objek Penelitian	32
3.3	Jenis dan Sumber Data	32
3.4	Teknik Pengumpulan Data	33
3.5	Teknik Analisis Data	33
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1	Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar.....	34
4.1.1	Sejarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar	34
4.1.2	Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar.....	34
4.1.3	Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar.....	36
4.1.4	Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar	40
4.2	Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	40
4.2.1	Analisis sistem penerimaan kas dan pengeluaran kas pada BPBD di Kabupaten Kampar	41
4.2.2	Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah pada BPBD di Kabupaten Kampar	45
4.2.3	Laporan Keuangan Daerah pada BPBD di Kabupaten Kampar	54
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	58
5.1	Simpulan.....	58
5.2	Saran	59
DAFTAR PUSTAKA		x

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Buku Kas Umum.....	47
Tabel 4.2	Jurnal Finansial	49
Tabel 4.3	Jurnal Anggaran	49
Tabel 4.4	Jurnal Penerimaan Kas.....	50
Tabel 4.5	Jurnal Pengeluaran Kas	50
Tabel 4.6	Buku Besar Kas.....	51
Tabel 4.7	Buku Besar Kasda.....	52
Tabel 4.8	Buku Besar Biaya Perjalanan Dinas	52
Tabel 4.9	Buku Besar Biaya Makanan dan Minuman	52
Tabel 4.10	Buku Besar Biaya Pajak Kendaraan Dinas Operasional.....	53

Dokumen ini adalah Arsip Miiik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Kedudukan Akuntansi Berdasarkan Entitas Pelaporan	15
Gambar 4.2 Siklus Penerimaan Kas	43
Gambar 4.3 Siklus Pengeluaran Kas	45



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Buku Kas Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar
- Lampiran 2 : Laporan SPJ Belanja Fungsional Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar
- Lampiran 3 : Laporan Realisasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar
- Lampiran 4 : Neraca Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar
- Lampiran 5 : Laporan Operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar
- Lampiran 6 : Laporan Perubahan Ekuitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar
- Lampiran 7 : Catatan atas Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan daerah ialah suatu kegiatan yang dikelola oleh pejabat pengelola keuangan daerah yang sesuai dengan kedudukan serta kewenangannya. Terdapat 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan juga pertanggungjawaban. Pada tahapan tersebut, kedudukan parlemen atau legislatif sangat diperlukan sebagai wakil rakyat. Pada pengelolaan keuangan daerah, perlu adanya pengawasan saat pelaksanaannya, serta dimintai pertanggungjawaban saat anggaran telah selesai digunakan.

Dalam lingkup pemerintahan pusat, kuasa pengguna anggaran di lingkungan Kementerian Negara / Lembaga merupakan Entitas Akuntansi, termasuk juga Bendahara Umum Daerah dan setiap pengguna anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah. Entitas Akuntansi juga merupakan unit yang akan mengelola anggaran yang memiliki kewajiban dalam menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan pada pemerintahan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan. Menurut ketentuannya, seperti peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan sebagai suatu laporan pertanggungjawaban. Setiap entitas pelaporan juga diwajibkan untuk menyajikan catatan atas laporan keuangan.

Akuntansi keuangan daerah adalah salah satu bidang yang terdapat dalam akuntansi sektor publik. Bidang ini merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan dari entitas pemerintah daerah seperti kabupaten, kota dan provinsi yang akan dijadikan sebagai acuan atau informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Tujuan akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan dan menyajikan informasi keuangan yang lengkap dan akurat. Informasi yang dimaksud yaitu mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas suatu entitas pelaporan. Hal ini dilakukan agar dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan suatu keputusan.

Peraturan pengelolaan keuangan daerah telah diperbaharui. Pembaharuan peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah tersebut ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kemudian ditindaklanjuti dengan adanya petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 dengan disahkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Terdapat dua subsistem dalam sistem pemerintahan daerah, yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). SKPD merupakan suatu bagian dari pemerintah daerah untuk

melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung ataupun tidak langsung. SKPKD menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas transaksi yang menjadi tanggungjawab SKPKD. Selain sebagai penanggungjawab penyusunan pelaporan keuangan yang telah dihasilkan oleh entitas pelaporan, SKPKD juga bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan akuntansi di SKPD dan Laporan Keuangan SKPD juga merupakan sumber untuk dapat menyusun Laporan Keuangan SKPKD.

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah yang merupakan salah satu unit kerja pada SKPD wajib menyajikan Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan. Kemudian Laporan Kinerja Tahunan tersebut harus disampaikan bersamaan dengan Laporan Keuangan Tahunan.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Pemerintah Daerah harus menggunakan akuntansi berbasis akrual dan membuat 7 laporan keuangan. Laporan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Operasional (LO), Laporan Neraca (LN), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar merupakan salah satu instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Kampar yang didirikan pada tanggal 09 November 2010 dan berdiri dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2010 dan berfungsi sebagai pelayanan masyarakat tentang bencana alam yang terjadi di Kabupaten Kampar. Selanjutnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah Republik Indonesia (BNPB RI) mengeluarkan Peraturan Kepala (Perka) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD di Provinsi dan Kabupaten untuk dapat membantu dalam penanggulangan bencana di daerah tersebut.

Pelaksanaan akuntansi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar ini berpedoman kepada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual; Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 07 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019; Peraturan Bupati Kampar Nomor 42 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kampar; dan Peraturan Bupati Kampar Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019.

Penyusunan laporan keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar dilakukan dengan menggunakan basis kas (*cash basis*) dan basis akrual (*accrual basis*). Basis kas (*cash basis*) untuk melakukan pengakuan yang terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (Lampiran 3). Basis akrual (*accrual basis*) untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang terdapat dalam Neraca

(Lampiran 4) diakui dan dicatat pada saat terjadinya suatu transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat diterima atau dibayarnya kas atau setara kas.

Proses akuntansi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar adalah dengan membuat Buku Kas Umum (Lampiran 1) yang di dalamnya terdapat kolom penerimaan dan pengeluaran kas untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi. Kemudian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar membuat Laporan SPJ Belanja Fungsional (Lampiran 2) yang akan dimasukkan ke dalam Laporan Realisasi Anggaran (Lampiran 3), maka selanjutnya proses akuntansi keuangan daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar tersebut adalah membuat Neraca (Lampiran 4). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar juga membuat Laporan Operasional (Lampiran 5) berdasarkan dari seluruh kegiatan operasional yang terjadi seperti yang terdapat pada Buku Kas Umum (Lampiran 1), dan membuat Laporan Perubahan Ekuitas (Lampiran 6) berdasarkan pada nilai ekuitas yang terdapat dalam Neraca (Lampiran 4).

Dari proses akuntansi yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar tersebut dapat diambil beberapa permasalahan. Masalahnya yaitu belum membuat jurnal, buku besar, dan jurnal penutup.

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, penulis ingin melakukan suatu penelitian yang akan membahas masalah Analisis dan Interpretasi data keuangan pemerintah daerah. Penulis kemudian mengambil judul : **“Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar.”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis dapat merumuskan masalah. Rumusan masalahnya yaitu : “Apakah penerapan akuntansi keuangan daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi keuangan daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan penulis. Khususnya menambah wawasan dalam bidang akuntansi secara umum dan akuntansi keuangan daerah.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar dalam melakukan perbaikan pencatatan laporan keuangan daerah. Hal

ini bertujuan agar lebih menyempurnakan lagi pencatatannya dan dapat sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

- c. Diharapkan juga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi, referensi dan bahan masukan. Hasil penelitian ini kemudian juga dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan akuntansi keuangan daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman dalam skripsi ini. Dalam sistematika penulisan ini penulis membaginya ke dalam 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Pada bab ini juga terdapat sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang menjadi suatu dasar dalam penelitian ini, yaitu meliputi : pengertian akuntansi, pengertian akuntansi keuangan daerah, perbedaan sektor publik dengan sektor swasta, tujuan laporan keuangan, kedudukan akuntansi keuangan daerah, asumsi dasar akuntansi keuangan daerah, sistem pencatatan dan dasar pengakuan akuntansi

keuangan daerah, siklus akuntansi keuangan daerah, prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan pemerintah daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Kemudian pada bab ini diakhiri dengan hipotesis

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Pada bab ini terdiri dari desain penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar. Penjelasan pada bab ini terdiri dari sejarah singkat BPBD Kampar, visi dan misi BPBD Kampar, struktur organisasi BPBD Kampar, dan fungsi BPBD Kampar. Bab ini juga berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan terhadap laporan keuangan daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini adalah bab penutup atau bab akhir. Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini yang semoga dapat bermanfaat bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Nordiawan (2012:1) mengemukakan bahwa, akuntansi adalah proses mengenali, mengukur, dan mengkomunikasikan suatu informasi ekonomi. Dari informasi ini dapat diperoleh suatu keputusan yang akurat oleh pemakai informasi yang bersangkutan.

Menurut Hantono dan Rahmi (2018:2) akuntansi adalah suatu seni (dikatakan seni karena harus rapi, teliti dan bersih) pencatatan, penggolongan, peringkasan dan pelaporan dengan cara yang baik dalam unit moneter atau transaksi keuangan atau kejadian lainnya yang berhubungan dengan keuangan perusahaan dan kemudian menafsirkan hasil hasil pencatatan tersebut.

American Accounting Association dalam Halim dan Kusufi (2018:36) mengemukakan bahwa :

Akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi/entitas yang akan dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Pengertian ini juga dapat melingkupi penganalisisan atas laporan yang dihasilkan oleh akuntansi tersebut.

Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan. Kesimpulannya adalah bahwa akuntansi merupakan suatu informasi yang akan digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi atau yang bersifat keuangan.

2.1.2 Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Halim dan Kusufi dalam Erlina *et al* (2016:4) yaitu Akuntansi keuangan daerah termasuk salah satu jenis akuntansi, oleh karena itu, pada akuntansi keuangan daerah ada proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan ekonomi yang terjadi di pemerintah daerah.

Halim dan Kusufi (2018:43) mengemukakan bahwa :

Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi). Dari proses tersebut kemudian akan dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang memerlukan.

Pihak-pihak eksternal yang dimaksud dalam memerlukan informasi akuntansi keuangan daerah adalah DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), investor, kreditor, donator, analisis ekonomi dan pemerhati pemerintah daerah, rakyat, pemerintah daerah lainnya. Pemerintah pusat yang semuanya terdapat dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah juga termasuk pihak eksternal.

2.1.3 Perbedaan Sektor Publik dengan Sektor Swasta

Menurut Sujarweni (2015:10) perbedaan sektor publik dengan sektor swasta adalah sebagai berikut :

- 1) Tujuan Organisasi
Tujuan utama pada sektor swasta yaitu untuk mencari laba, sedangkan pada sektor publik untuk penyediaan pelayanan publik atau masyarakat seperti layanan kesehatan, pendidikan, pengairan, transportasi, penerangan, dll.
- 2) Sumber Pembiayaan
Sumber pendanaan pada sektor swasta berasal dari modal pribadi atau sekelompok orang, sedangkan pada sektor publik pendanaannya dari pemerintah yang berasal dari pendapatan daerah, pajak retribusi, dll.
- 3) Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban sektor swasta kepada pemilik modal, sedangkan sektor publik mesti dipertanggungjawabkan kepada masyarakat karena sumber dananya dari masyarakat.
- 4) Struktur Organisasi
Secara struktur organisasi pada sektor swasta lebih fleksibel, seperti yang dikehendaki oleh manajemen dan pemilik modal, sedangkan pada sektor publik memiliki struktur organisasi yang birokratis.
- 5) Karakteristik Anggaran
Anggaran pada sektor swasta tidak dipublikasikan, sedangkan pada sektor publik wajib untuk dipublikasikan.
- 6) Sistem Akuntansi yang digunakan
Sistem akuntansi swasta lebih banyak menggunakan basis akrual, sedangkan sektor publik menggunakan basis kas

2.1.4 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan ialah penyajian suatu informasi tentang posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan, hal ini dapat berguna bagi para pengguna dalam membuat dan melakukan evaluasi putusan terhadap alokasi sumber daya, (Erlina *et al*, 2016:20).

Menurut SAP (2010:12) pelaporan keuangan pemerintah diwajibkan menyediakan suatu informasi yang dapat bermanfaat untuk para pengguna. Manfaatnya tersebut baik dalam melakukan penilaian akuntabilitas kemudian membuat suatu keputusan baik keputusan ekonomi, politik, maupun sosial, yaitu dapat dilakukan dengan cara :

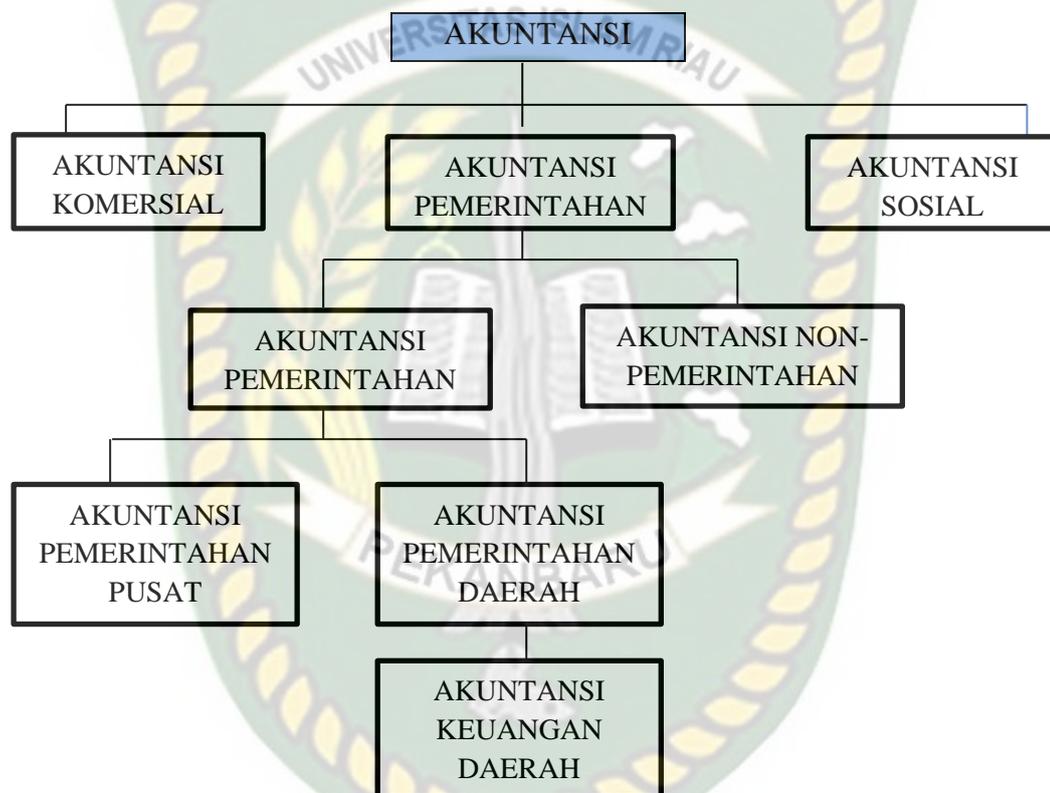
- a. Melakukan penyediaan suatu informasi mengenai sumber, alokasi dan tentang kegunaan sumber daya keuangan.
- b. Menyajikan informasi tentang kecukupan penerimaan periode berjalan untuk melakukan pembiayaan terhadap seluruh pengeluaran.
- c. Melakukan penyediaan informasi terkait jumlah sumber daya ekonomi yang dapat dipergunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil yang dicapai.
- d. Melakukan penyediaan informasi tentang bagaimana entitas pelaporan tersebut mendanai seluruh kegiatannya dan dapat mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Melakukan penyediaan informasi tentang posisi keuangan dan keadaan entitas pelaporan yang terkait dengan sumber penerimaannya baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang, dan termasuk juga yang berasal dari hasil pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Melakukan penyediaan informasi tentang perubahan posisi keuangan entitas pelaporan yaitu apakah terjadi kenaikan atau penurunan selama periode pelaporan.

2.1.5 Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah

Sugijanto, dkk dalam Halim dan Kusufi (2018:38) mengemukakan bahwa Akuntansi terdiri dari tiga bidang utama, yakni akuntansi komersial/perusahaan (*commercial accounting*), akuntansi pemerintahan (*governmental accounting*), dan juga akuntansi sosial (*social accounting*).

Berikut gambar kedudukan akuntansi keuangan daerah (provinsi, kabupaten/kota) dalam akuntansi berdasarkan entitas pelaporan :

Gambar 4.1
Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah Berdasarkan Entitas Pelaporan



Berdasarkan gambar siklus akuntansi keuangan daerah di atas, yang dimaksud dengan akuntansi komersial ialah data akuntansi yang digunakan untuk memberikan informasi keuangan kepada manajemen, pemilik dan penanam modal, kreditor dan pihak lain yang memiliki kepentingan dengan perusahaan tersebut. Kemudian dalam akuntansi pemerintahan, data yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah

kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat, sedangkan akuntansi sosial ialah bidang akuntansi khusus yang diterapkan pada lembaga dalam artian makro yang melayani perekonomian nasional.

Lingkup akuntansi pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Akuntansi pemerintahan pusat
2. Akuntansi pemerintahan daerah, terdiri atas :
 - a. Akuntansi pemerintahan provinsi
 - b. Akuntansi pemerintahan kabupaten/kota

2.1.6 Asumsi Dasar Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Erlina *et al* (2016:7) asumsi dasar akuntansi keuangan daerah terdiri dari :

1). **Asumsi kemandirian entitas**

Asumsi kemandirian entitas yaitu setiap unit organisasi yang dianggap unit mandiri dan memiliki keharusan untuk dapat menyajikan laporan keuangan agar tidak terjadi suatu kekacauan atau permasalahan antar-unit instansi pemerintah dalam melakukan pelaporan keuangan. Indikasi terpenuhinya asumsi kemandirian entitas ini ialah adanya kewenangan entitas dalam menyusun anggaran dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya.

2). **Asumsi kesinambungan entitas**

Dalam asumsi kesinambungan entitas, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud dalam melakukan likuidasi atas entitas pelaporan jangka pendek. Kemudian disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya.

3). Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*)

Pada asumsi ini laporan keuangan entitas pelaporan wajib memberikan penyajian pada kegiatan yang diasumsikan. Kemudian bisa dinilai dengan satuan uang supaya memungkinkan dapat dilakukannya analisis dan suatu pengukuran dalam akuntansi.

2.1.7 Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Daerah

1. Sistem Pencatatan

Menurut Halim dan Kusufi dalam Erlina *et al* (2016:4) ada beberapa sistem pencatatan yang digunakan dalam akuntansi keuangan daerah. Sistem pencatatannya yaitu :

1). *Single Entry*

Sistem pencatatan *single entry* disebut sebagai sistem tata buku tunggal. Pada sistem *single entry* ini, dilakukan pencatatan transaksi ekonomi hanya satu kali. Kemudian transaksi yang memiliki akibat bertambahnya kas dicatat di sisi penerimaan, sedangkan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dilakukan pencatatan di sisi pengeluaran. *Single entry* ini juga disebut sebagai pembukuan. Kelebihan dari sistem ini ialah sederhana dan mudah untuk dipahami. Kelemahan dari sistem ini ialah kurang bagus untuk pelaporan dan sulit menemukan kesalahan dalam pembukuan yang terjadi.

2). *Double Entry*

Sistem pencatatan *double entry* disebut dengan sistem tata buku berpasangan. Pada sistem ini, dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali, maksudnya adalah setiap transaksi minimal akan memengaruhi dua perkiraan, satu di sisi debit (sebelah kiri) dan satu di sisi kredit (sebelah kanan). Sistem *double entry* ini juga disebut dengan istilah menjurnal. Setiap pencatatan harus seimbang dengan persamaan dasar akuntansi. Rumus persamaan dasar akuntansi :

$$\text{ASET} + \text{BEBAN} = \text{UTANG} + \text{EKUITAS} + \text{PENDAPATAN}$$

3). *Triple Entry*

Sistem pencatatan *triple entry* adalah sistem pencatatan yang dikembangkan dari *double entry* yaitu yang ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran sehingga bisa dilihat sisa anggaran untuk masing-masing komponen yang terdapat di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Kemudian pencatatan dengan sistem *triple entry* ini dilakukan saat pencatatan *double entry* dilaksanakan.

2. Dasar Pengakuan (*recognition*)

Recognition adalah suatu penentuan kapan transaksi akan dilakukan pencatatan. Definisi pengakuan dalam akuntansi menurut SAP dalam Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2018:52) adalah :

Proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan dalam suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang akan melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban. Proses ini sebagaimana akan dimuat dalam laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.

Menurut Halim dan Kusufi (2018:52) suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui harus memiliki kriteria minimum yang harus dipenuhi, yaitu :

- 1). Terdapat kemungkinan bahwa ekonomi memiliki manfaat. Manfaat tersebut berkaitan dengan kejadian tersebut akan mengalir keluar atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan.
- 2). Kejadian tersebut memiliki nilai atau beban. Nilai atau beban tersebut adalah yang dapat diukur atau diestimasi.

Selain itu, kapan suatu kejadian transaksi dicatat juga dapat menggunakan berbagai basis/sistem/dasar akuntansi. Menurut Partono dalam Halim dan Kusufi

(2018:52) dijelaskan bahwa basis/dasar akuntansi atau sistem pencatatan ialah himpunan dari standar akuntansi yang harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan.

Menurut Erlina *et al* (2016:11) basis akuntansi ada tiga, yaitu terdiri dari :

1). Akuntansi Berbasis Kas (*Cash Based Accounting*)

Akuntansi berbasis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Ruang lingkup akuntansi berbasis kas ini meliputi saldo kas, penerimaan kas dan pengeluaran kas. Keterbatasan basis ini adalah keterbatasan pada informasi yang dihasilkan karena terbatas pada pertanggungjawaban kas saja dan tidak memperlihatkan pertanggungjawaban manajemen atas aset dan kewajiban.

2). Akuntansi Berbasis Kas menuju Akrual (*Cash Toward Accrual Based Accounting*)

Akuntansi berbasis kas menuju akrual merupakan proses transisi. Dalam basis ini, pendapatan, belanja dan biaya dicatat berdasarkan basis kas. Sedangkan aset, utang dan ekuitas dana dicatat berdasarkan basis akrual.

3). Akuntansi Berbasis Akrual (*Accrual Based Accounting*)

Akuntansi berbasis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima/dibayar. Sistem ini berfokus pada pengukuran sumber daya ekonomis dan juga perubahan daya pada entitas. Pada akuntansi akrual, informasi yang didapat jauh lebih lengkap dan juga rinci mengenai aset dan kewajiban. Menurut Erlina dan Rasdianto (dalam Erlina *et al*, 2015:11) yaitu “sistem akuntansi ini merupakan sistem yang paling *modest*.”

2.1.8 Siklus Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Halim dan Kusufi dalam Erlina *et al* (2016:5) akuntansi adalah suatu sistem yang mengolah input (masukan) dan menjadi output (keluaran). Input

sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir dan outputnya adalah dalam bentuk laporan keuangan.

Berikut adalah siklus akuntansi keuangan daerah dalam laporan keuangan :

1. Analisis Transaksi

Analisis transaksi yaitu harus mendokumentasikan transaksi keuangan dalam bukti dan melakukan analisis transaksi keuangan tersebut. Menurut Halim dan Kusufi (2018:58) contoh dari menganalisis transaksi misalnya, pemerintah daerah mengeluarkan kas untuk membayar sewa garasi. Pada transaksi ini, akuntansi mencatat tidak hanya “pengeluaran kasnya”, tetapi juga “untuk apa” kas itu dikeluarkan. Kemudian untuk lebih memahami analisis transaksi dapat menggunakan “persamaan dasar akuntansi” dan analisis pengaruhnya atas kas untuk menentukan pencatatan di buku anggaran.

2. Jurnal Transaksi

Tahapan selanjutnya yaitu memasukkan transaksi-transaksi ke dalam jurnal. Menurut Halim dan Kusufi (2018:58) buku jurnal ialah media untuk mencatat transaksi secara kronologis. Pada sistem pencatatan *triple entry*, buku jurnal digunakan untuk mencatat transaksi untuk jurnal finansial, jurnal penyesuaian dan juga jurnal penutup, sementara jurnal anggaran dicatat pada buku anggaran.

3. Posting ke Buku Besar

Menurut Halim dan Kusufi (2018:58) setelah dilakukan jurnal, kemudian jumlah yang terdapat pada sisi debit dan kredit dipindahkan ke rekening buku besar yang sesuai. Buku besar ialah sebuah buku yang berisi kumpulan rekening/akun/perkiraan yang bertujuan untuk mencatat secara terpisah antara pendapatan, pembiayaan, belanja, aktiva, utang dan ekuitas dana.

4. Neraca Saldo

Menurut Halim dan Kusufi (2018:58) neraca saldo ialah daftar rekening beserta saldo yang menyertainya. Saldo transaksi diambil angkanya dari saldo terakhir yang ada di setiap transaksi. Neraca saldo yang benar harus memiliki kesamaan keseluruhan jumlah pendebitan dengan keseluruhan jumlah pengkreditan. Neraca saldo akan benar jika proses pemindahan transaksi dari jurnal ke rekening juga benar.

5. Jurnal Penyesuaian

Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada periode akuntansi untuk memastikan bahwa pendapatan diakui pada periode diperolehnya pendapatan itu dan beban diakui pada periode terjadinya. Menurut Halim dan Kusufi (2018:58) penyesuaian yang wajib dilakukan oleh entitas pemerintah daerah adalah penyesuaian pada akhir tahun anggaran.

6. Neraca Saldo Setelah Penyesuaian

Menurut Halim dan Kusufi (2018:58) neraca saldo setelah penyesuaian ialah neraca saldo yang disusun setelah pembuatan jurnal penyesuaian. Jika dalam tahap penyesuaian muncul transaksi baru, maka transaksi baru tersebut juga dimasukkan dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Format neraca saldo setelah penyesuaian ini kurang lebih sama dengan neraca saldo.

7. Laporan Keuangan

Menurut Halim dan Kusufi (2018:58) dalam menyusun laporan keuangan ialah dengan mengambil data dari neraca saldo setelah penyesuaian. Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

8. Jurnal Penutup

Menurut Halim dan Kusufi (2018:58) istilah transfer saldo transaksi temporer ke dalam rekening ekuitas adalah menutup rekening temporer, dan

proses ini disebut dengan penutupan rekening temporer. Proses penutupan rekening temporer ini meliputi 3 tahap. Tahap 1 menutup rekening pendapatan ke transaksi ikhtisar surplus/defisit-LO, tahap 2 menutup rekening beban ke rekening ikhtisar surplus/defisit-LO, dan tahap 3 menutup rekening ikhtisar surplus defisit-LO ke rekening ekuitas.

9. Neraca Saldo Setelah Tutup Buku

Menurut Halim dan Kusufi (2018:58) neraca saldo setelah tutup buku juga berisi ringkasan saldo rekening, hanya saja saldo tersebut adalah setelah pembuatan jurnal penutup. Pada proses penutupan rekening temporer mentransfer saldo transaksi pendapatan dan beban ke rekening ekuitas, maka dalam neraca saldo setelah tutup buku tidak akan dijumpai rekening temporer tersebut, jika ada, saldonya akan bernilai nol.

2.1.9 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Menurut Erlina *et al* (2016:14) ada tujuh (7) prinsip yang akan dipergunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Prinsip tersebut yaitu sebagai berikut :

1). Prinsip Nilai Historis

Aset dicatat sebagai pengeluaran kas dan setara kas dibayar sejumlah nilai wajar atas imbalan (*consideration*). Ini digunakan untuk mendapatkan aset tersebut pada saat perolehan.

2). Prinsip Realisasi

Bagi pemerintah, pendapatan yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan dipergunakan untuk melakukan pembayaran utang dan belanja pada periode tersebut.

3). Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang harus disajikan, transaksi ataupun peristiwa lain

tersebut mesti dicatat kemudian disajikan sesuai substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya aspek formalitasnya. Jika substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten atau berbeda dengan aspek formalitasnya, lalu hal tersebut perlu dikatakan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan. Contohnya seperti transaksi yang seharusnya dikelompokkan sebagai belanja modal, tetapi pada penyusunan anggaran dikelompokkan sebagai belanja barang dan jasa, maka di dalam pelaporannya informasi tersebut harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan dan kemudian dilaksanakan jurnal koreksi dan hasil dari pengeluaran tersebut akan dapat memberi pengaruh pada neraca yakni akan menambah nilai aset tetap.

4). Prinsip Periodisitas

Periode utama yang dipergunakan ialah tahunan. Tetapi, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga disarankan. Pembagian periode ini dilakukan agar kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.

5). Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini berarti bukan tidak boleh terjadinya perubahan dari satu metode akuntansi ke metode lainnya. Metode tersebut dapat diubah dengan syarat yaitu metode yang baru diterapkan sanggup memberi informasi yang lebih baik dibandingkan dengan metode lama. Dari perubahan metode tersebut, pengaruhnya harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

6). Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang akan diperlukan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan tersebut dapat diletakkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

7). Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Dalam rangka penyajian secara wajar, maka faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan dibutuhkan disaat menghadapi ketidakpastian kejadian/peristiwa tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian saat melakukan prakiraan atas kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan

kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya membentuk cadangan tersembunyi, sengaja melakukan penetapan aset atau pendapatan yang terlalu rendah atau sengaja mencatat kewajiban/belanja yang terlalu tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

2.1.10 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pembuatan suatu laporan keuangan dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan keuangan tersebut akan dikonsolidasikan oleh pelaporan, hal ini disebut sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten.

Menurut Erlina *et al* (2016:23) komponen yang terdapat pada laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan keuangan. Seluruh komponen tersebut menjadi sebagai berikut :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Perubahan SAL)
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional (LO)
- e. Laporan Arus Kas
- f. Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Selain itu, entitas pelaporan wajib melakukan atau membuat penyajian laporan lain atau informasi akuntansi. Hal ini diwajibkan oleh *statutory reports* atau peraturan perundang-undangan. Entitas pelaporan menyajikan informasi tersebut agar dapat membantu para pengguna dalam memperkirakan hasil operasi entitas dan pengelolaan aset.

2.1.11 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 adalah peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat (6) adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, kemudian pertanggungjawaban hingga pengawasan keuangan daerah.

Ruang lingkup keuangan daerah juga terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 2. Ruang lingkup tersebut meliputi :

- a. Hak daerah melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan suatu pinjaman,
- b. Kewajiban daerah dalam melakukan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga,
- c. Penerimaan daerah,
- d. Pengeluaran daerah,
- e. Kekayaan daerah yang dijalankan sendiri atau pihak lain seperti berupa uang, surat berharga, barang, piutang, dan hak-hak lain yang bisa dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang akan dipisahkan pada perusahaan daerah,
- f. Kekayaan pada pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah atau dan/atau kepentingan umum.

Kemudian pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 3 berisikan tentang pengelolaan keuangan daerah. Hal ini meliputi :

- a. Asas umum pengelolaan keuangan daerah,
- b. Pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah,
- c. Struktur APBD,
- d. Penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD,
- e. Penyusunan dan penetapan APBD,
- f. Pelaksanaan dan perubahan APBD,
- g. Penatausahaan keuangan daerah,
- h. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,
- i. Pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD,
- j. Pengelolaan kas umum daerah,
- k. Pengelolaan piutang daerah,
- l. Pengelolaan investasi daerah,
- m. Pengelolaan barang milik daerah,
- n. Pengelolaan dana cadangan,
- o. Pengelolaan utang daerah,
- p. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah,
- q. Penyelesaian kerugian daerah,
- r. Pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah,
- s. Pengaturan pengelolaan keuangan daerah.

Kuangan daerah dijalankan dengan tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan kemudian

bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, manfaat masyarakat, dan kepatutan. Pengelolaan keuangan daerah juga dilakukan pada suatu sistem yang terintegrasi dan kemudian akan diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

2.1.12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pasal 1 Ayat (2) menyatakan bahwa akuntansi adalah suatu proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian dan penyajian laporan. Akuntansi juga melakukan suatu proses dalam penginterpretasian atas hasilnya.

Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian yang sistematis dari suatu prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain. Sistem ini dilakukan agar dapat mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah, sedangkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam melakukan penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Kemudian Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) adalah SAP yang diberi judul, nomor dan tanggal efektif. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) adalah suatu penjelasan, klarifikasi dan uraian yang lebih lanjut atas PSAP.

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah suatu konsep dasar pada penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dapat dijadikan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

2.1.13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Keuangan daerah pada Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat (6) adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang dapat berhubungan dengan hak dan kewajiban pada daerah tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang akan dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Kebijakan umum APBD atau disingkat dengan KUA ialah suatu dokumen yang berisikan kebijakan pada bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun, sedangkan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) ialah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisikan tentang rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai suatu dasar dalam penyusunan APBD.

Terdapat beberapa tata cara pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja keperluan tanggap darurat bencana. Tata cara tersebut dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh kepala daerah, kepala SKPD yang melakukan fungsi penanggulangan bencana. Hal ini dilakukan dalam mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD,
- b. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana. Pencairan ini dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB,
- c. Pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU. Kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran SKPD yang akan melakukan fungsi penanggulangan bencana,
- d. Penggunaan dana tanggap darurat tersebut akan dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri. Pencatatan ini akan dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melakukan fungsi penanggulangan bencana,
- e. Kepala SKPD yang melakukan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya,

- f. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut akan disampaikan oleh Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD. Pertanggungjawaban ini dilakukan dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.

Dalam keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, kemudian pengeluaran tersebut disampaikan ke dalam laporan realisasi anggaran. Pengeluaran yang dimaksud disini ialah termasuk belanja untuk kebutuhan mendesak yang jika ditunda akan menimbulkan kerugian.

2.1.14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 merupakan peraturan tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan pada pemerintah daerah yang berbasis akrual. Basis akrual yaitu basis akuntansi yang melakukan pencatatan ketika kas diterima atau dibayar yang akan digunakan dalam mengambil keputusan atau kebijakan akuntansi dalam suatu proses pembuatan laporan keuangan.

2.2 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori yang telah dikemukakan dapat diambil suatu hipotesis. Hipotesis yang dapat diambil adalah sebagai berikut : **“Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum”**.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Pada penelitian ini desain yang digunakan adalah metode kualitatif karena dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data dan kemudian memanfaatkan teori yang ada.

3.2 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bagian keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar ini berada di Jl. HR. Soebrantas Komplek Perkantoran Bupati Lama Bangkinang.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penulis menggunakan dua jenis data pada penelitian ini. Jenis data yang digunakan yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama. Sumber ini didapat dengan cara melakukan wawancara lisan pada bagian keuangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data keuangan yang diperoleh dari kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar. Data tersebut didapat dalam bentuk yang sudah jadi.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pada pengumpulan data dari penulisan ini yaitu menggunakan beberapa teknik. Teknik yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara langsung dengan pejabat terkait seperti kepala sub bagian keuangan dan staf-staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar.
- b. Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan memfotocopy dokumen atau laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut adalah laporan yang diperoleh dari bagian keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar.

3.5 Teknik Analisis Data

Untuk menelaah permasalahan yang diangkat dalam penelitian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) Kabupaten Kampar ini penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode deskriptif yaitu dengan cara mengumpulkan data dan kemudian akan disusun agar dapat dirumuskan suatu kesimpulan pada analisis data tersebut yang akan disajikan dalam bentuk skripsi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar

4.1.1 Sejarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar didirikan pada tanggal 09 November 2010. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar ini didirikan karena di Kabupaten Kampar selalu terjadi bencana setiap tahunnya seperti tanah longsor, banjir, kebakaran hutan dan lahan, bencana kekeringan dan juga angin puting beliung.

Berdasarkan Undang-Undang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) didirikan untuk memegang tanggung jawab atas penanggulangan bencana. Dengan berdirinya BPBD di Kabupaten Kampar maka diharapkan kegiatan penanggulangan bencana di daerah tersebut akan lebih terkoordinasi dan terarah.

4.1.2 Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar

a. Visi

“Tanggap, Tangguh, Terampil dan Tuntas dalam Menanggulangi Bencana.”

1. **Tanggap** ialah memiliki kepedulian yang tinggi dalam penanggulangan bencana.
2. **Tanggung** ialah memiliki kemampuan yang dapat dipercaya dalam menghadapi bencana serta memiliki kemampuan dan kepekaan di dalam pengendalian bencana.
3. **Terampil** ialah memiliki kemampuan dan keahlian yang sesuai dengan standar yang dimiliki dalam penanggulangan bencana.
4. **Tuntas** ialah melaksanakan upaya-upaya pemulihan dengan baik, terencana, terkoordinasi, menyeluruh terhadap permasalahan yang ditimbulkan oleh bencana yang terjadi.

b. Misi

1. Memperkuat kapasitas aparaturnya dan lembaga dalam penanggulangan bencana.
2. Memberdayakan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
3. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal.
4. Melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
5. Melakukan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan cepat, tepat dan komprehensif.

4.1.3 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar

Gambaran struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Unsur Pengarah
3. Unsur Pelaksana
 - a. Kepala Pelaksana
 - b. Sekretariat
 - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - d. Seksi Kedaruratan dan logistic
 - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - f. Seksi Pemadam Kebakaran

Dari uraian di atas, maka pembagian dan pelaksanaan tugasnya dapat disusun sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan yaitu selaku kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan pedoman dan juga pengarahan terhadap usaha pada penanggulangan bencana yang mencakup hal-hal seperti pencegahan bencana, penanganan darurat dan rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan juga merata.

b. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan pada penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan.

2. Unsur Pengarah

Unsur pengarah memiliki anggota yang terdiri dari kalangan Ahli/Profesional dan memiliki tugas pokok memberikan suatu masukan dan saran kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam kegiatan penanggulangan bencana.

3. Unsur Pelaksana

Kepala pelaksana penanggulangan bencana disebut dengan kepala pelaksana berada di bawah kemudian akan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Kepala pelaksana tersebut melakukan sistem pengendalian internal, memimpin, mengkoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya juga merupakan suatu tugas dari kepala pelaksana.

a. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh kepala sekretariat yang memiliki tugas pokok dalam membantu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Kepala sekretariat memiliki tugas membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam mengkoordinasi

perencanaan, pembinaan dan juga pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama.

Sekretariat unsur pelaksana terdiri dari :

- 1) Sub bagian umum dan kepegawaian yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang melakukan tugasnya berada di bawah, bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat. Tugasnya adalah membantu kepala sekretariat dalam pengelolaan administrasi dan kepegawaian, rumah tangga, peralatan dan perlengkapan badan.
- 2) Sub bagian perencanaan yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan yang melakukan tugasnya berada di bawah, bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat. Tugasnya adalah mempersiapkan penyusunan rencana program atau kegiatan tahunan, pelaksanaan evaluasi dan juga pelaporan.
- 3) Sub bagian keuangan yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang melakukan tugasnya berada di bawah, tanggung jawab kepala sekretariat. Tugasnya adalah melaksanakan pengelolaan dalam administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran dan belanja badan, verifikasi, perbendaharaan dan juga penyusunan pertanggungjawaban terhadap keuangan badan.

b. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Seksi ini dipimpin oleh kepala seksi yang memiliki tugas pokok dalam membantu kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yaitu dalam pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana seperti pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana dan pemberdayaan masyarakat.

c. Seksi Kedaruratan dan Logistik

Pemimpin pada bidang ini adalah seorang kepala bidang yang memiliki tugas pokok dalam pengumpulan dan pengolahan data rangka penyelamatan, evakuasi akibat bencana disaat tanggap darurat melalui dukungan logistik.

d. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Seksi ini juga dipimpin oleh kepala seksi. Tugas pokok kepala seksi pada seksi ini yaitu melakukan pengumpulan bahan dan juga data dalam rangka penyusunan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

e. Seksi Pemadam Kebakaran

Seksi pemadam kebakaran dipimpin oleh kepala seksi yang memiliki tugas pokok yaitu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan juga memberi dukungan serta pelaksanaan tugas pemerintahan pada bidang pemadam kebakaran.

4.1.4 Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha dalam penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan perundang-undangan.
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana serta melakukan pemantauan.
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tentang penanggulangan bencana.
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali pada kondisi normal dan kondisi darurat bencana.
6. Mengendalikan pengumpulan/penyaluran uang dan barang.
7. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
8. Dan melakukan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berikut akan dijelaskan hasil penelitian tentang Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(BPBD) di Kabupaten Kampar. Dari data yang telah diperoleh, maka dapat dianalisa tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang diterapkan oleh BPBD di Kabupaten Kampar.

4.2.1 Analisis sistem penerimaan kas dan pengeluaran kas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar

1. Sistem Penerimaan Kas

a. Penerimaan kas di Bendahara Penerimaan

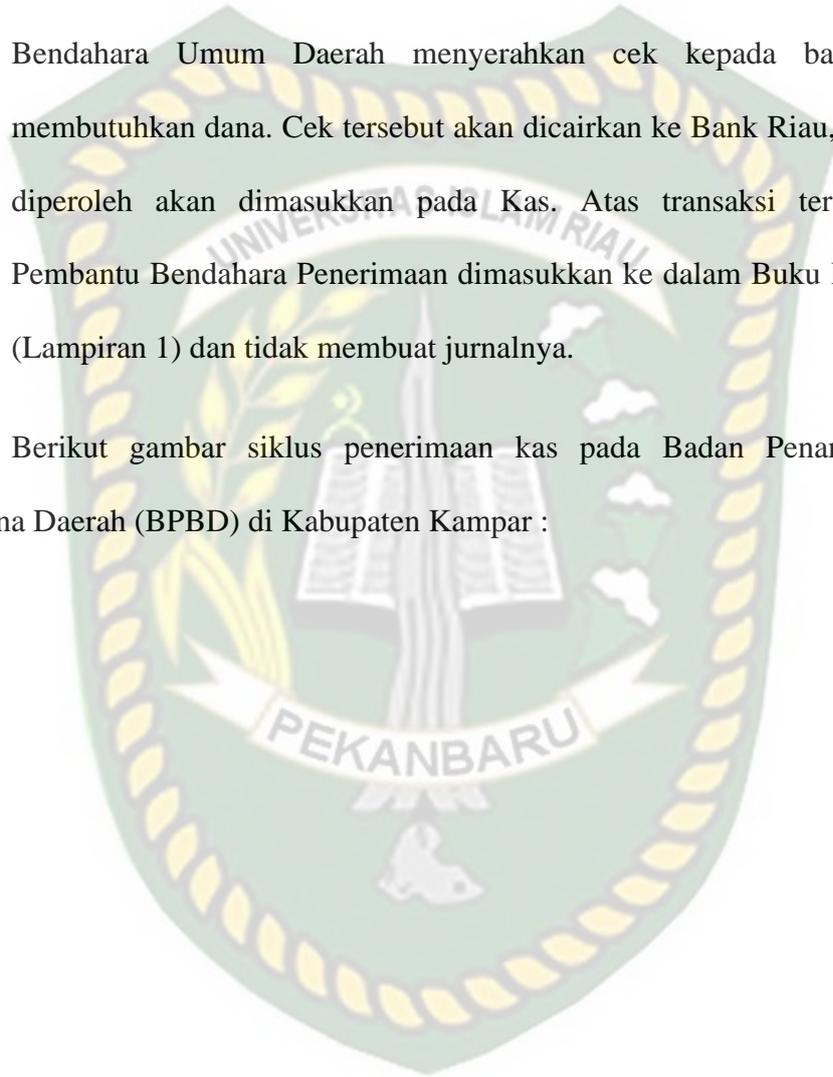
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar memiliki target dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari retribusi umum yaitu retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran (racun api). Proses penerimaannya yaitu wajib retribusi menyetorkan dana retribusi kepada bendahara penerimaan, selanjutnya bendahara penerimaan mengeluarkan surat bukti penerimaan dana retribusi tersebut dan ditanda tangani oleh Kepala Badan.

b. Penerimaan kas di Bendahara Pengeluaran

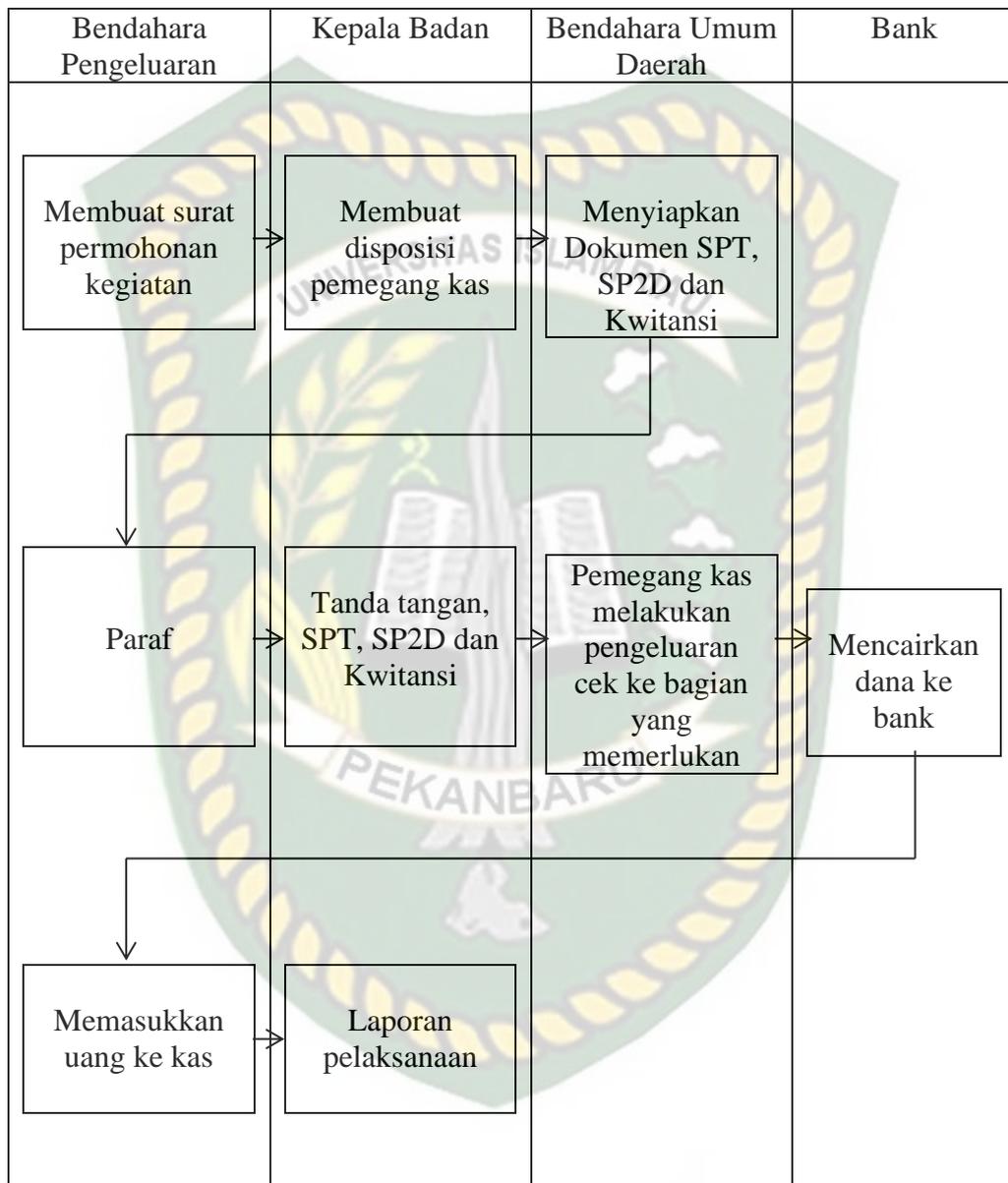
Sebelum terjadinya penerimaan dana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar, Bendahara Pengeluaran harus membuat surat permohonan kegiatan yang sesuai dengan rencana kerja Kepala Badan sebagai pengguna anggaran. Kepala Badan disposisi untuk pemegang kas yang kemudian akan diserahkan kepada Bendahara

Umum Daerah. Kemudian Bendahara Umum Daerah mengeluarkan SPD, SP2D, kwitansi, perincian dan akan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Kepala Badan. Selanjutnya setelah ditandatangani, Bendahara Umum Daerah menyerahkan cek kepada bagian yang membutuhkan dana. Cek tersebut akan dicairkan ke Bank Riau, uang yang diperoleh akan dimasukkan pada Kas. Atas transaksi tersebut oleh Pembantu Bendahara Penerimaan dimasukkan ke dalam Buku Kas Umum (Lampiran 1) dan tidak membuat jurnalnya.

Berikut gambar siklus penerimaan kas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar :



Gambar 4.2
Siklus Penerimaan Kas
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar



Sumber : Data yang diolah oleh Penulis, 2021

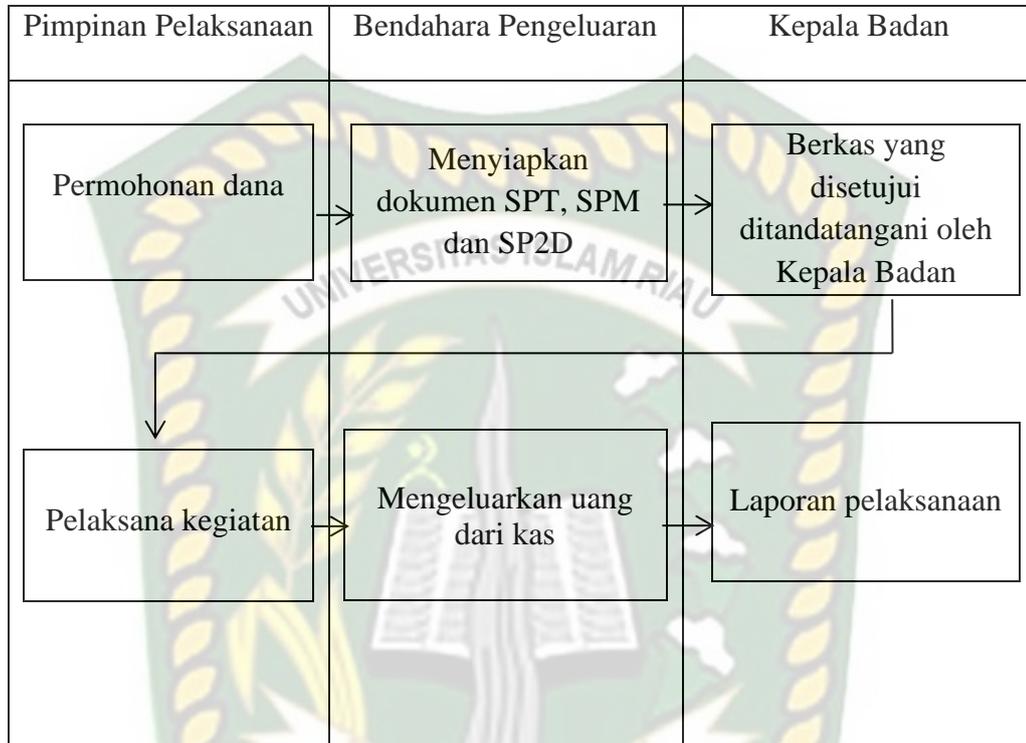
Dapat disimpulkan dari siklus penerimaan kas yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar di atas dapat memudahkan dalam mengontrol uang yang diterima dan memudahkan pencatatan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar.

2. Sistem Pengeluaran Kas

Proses pengeluaran kas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar dimulai dari pimpinan pelaksana yang mengajukan permohonan dana, kemudian atasan Bendahara Pengeluaran memberikan persetujuan pembayaran yang akan dilakukan oleh pimpinan pelaksana. Bendahara Pengeluaran akan mengeluarkan kwitansi semua pengeluaran tersebut, lalu mengeluarkan uang dari kas, dibukukan dan dibuatkan beberapa dokumen yaitu SPD, SP2D dan SPM sebagai bukti atas pengeluaran. Dokumen tersebut kemudian diperiksa dan ditandatangani oleh atasan Bendahara Pengeluaran dan Kepala Badan. Penerimaan kas dan pengeluaran kas yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar tidak membuat jurnal atas transaksi yang terjadi.

Berikut ini gambar siklus pengeluaran kas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar :

Gambar 4.3
Siklus Pengeluaran Kas
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar



Sumber : Data yang diolah oleh Penulis, 2021

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar menggunakan siklus pengeluaran kas pada tabel di atas yaitu untuk memudahkan suatu pengontrolan keuangan yang dikeluarkan dan juga untuk memudahkan proses pencatatan atas pengeluaran yang dilakukan.

4.2.2 Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar

Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar belum sepenuhnya menggunakan sistem akuntansi yang sesuai dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa setiap transaksi harus dijurnal, diposting ke Buku Besar dan kemudian membuat daftar saldo, lalu selanjutnya membuat jurnal penyesuaian dan juga membuat laporan keuangan seperti Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Catatan atas Laporan Keuangan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar hanya mencatat setiap transaksi ke dalam Buku Kas Umum (BKU) saja. Hal ini dapat dilihat pada transaksi berikut ini :

02 Desember 2019 : Diterima SP2D Nomor
06914/SP2D/LS/2.05.03/IV/2019 untuk
pembayaran gaji bulan Desember sebesar Rp
172.534.604.

05 Desember 2019 : Pembayaran biaya perjalanan dinas ke luar
daerah sebesar Rp 17.532.000.

12 Desember 2019 : Diterima SP2D Nomor
07390/SP2D/LS/2.05.03/IV/2019 untuk
tambahan penghasilan sebesar Rp
118.509.500.

23 Desember 2019 : Pembayaran biaya makanan dan minuman
pelatihan pembaretan sebesar
Rp 20.580.000.

23 Desember 2019 : Pembayaran biaya pajak kendaraan dinas operasional (mobil Ford) sebesar Rp 2.546.000.

27 Desember 2019 : Diterima oleh Bendahara untuk belanja jasa konsultasi pengawasan Nomor 08217/SP2D/LS/2.05.03/IV/2019 sebesar Rp 47.127.300.

Transaksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar di atas dicatat ke dalam Buku Kas Umum (Lampiran 1) yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.1
Buku Kas Umum
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar
Desember 2019

No. BKU	Tanggal	Uraian	Kode rek.	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
01162-B02	02 Des 2019	Diterima SP2D No. 06914	5.1	172.534.604	-
01177-B02	05 Des 2019	Pembayaran perjalanan dinas ke luar daerah	5.2.2.1 5.02	-	17.532.000
01262-B02	12 Des 2019	Diterima SP2D No. 07390	5.1	118.509.500	-
01271-B02	23 Des 2019	Pembayaran biaya makan dan minum	5.2.2.1 1.05	-	20.580.000
01376-	23 Des	Pembayaran	5.2.2.0 5.05	-	2.546.000

B02	2019	biaya pajak kendaraan dinas operasional			
01402-B02	27 Des 2019	Diterima oleh Bendahara untuk belanja jasa konsultasi pengawasan No. 08217	5.2.2.2 1.03	47.127.300	-

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar

Setelah membuat Buku Kas Umum dan merekap biaya pengeluaran ke dalam Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar juga membuat Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dari penerapan akuntansi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar tersebut belum sesuai sepenuhnya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

Proses akuntansi keuangan daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 yang semestinya dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar yaitu sebagai berikut :

1. Transaksi di atas dibuat jurnal

Berikut Tabel Jurnal Finansial dan Anggaran yang harus dibuat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar :

Tabel 4.2
Jurnal Finansial
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar

Tanggal	Uraian	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
02 Des 2019	Tidak ada jurnal	-	-
05 Des 2019	Beban perjalanan dinas Kas di bendahara pengeluaran	17.532.000	17.532.000
12 Des 2019	Tidak ada jurnal	-	-
23 Des 2019	Beban makan dan minum Kas di bendahara pengeluaran	20.580.000	20.580.000
	Beban pajak kendaraan dinas Kas di bendahara pengeluaran	2.546.000	2.546.000
27 Des 2019	Tidak ada jurnal	-	-

Sumber : Data yang diolah oleh Penulis, 2021

Tabel 4.3
Jurnal Anggaran
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar

Tanggal	Uraian	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
02 Des 2019	Kas di bendahara pengeluaran Estimasi perubahan SAL	172.534.604	172.534.604
05 Des 2019	Belanja perjalanan dinas Estimasi perubahan SAL	17.532.000	17.532.000
12 Des 2019	Kas di bendahara pengeluaran Estimasi perubahan SAL	118.509.500	118.509.500
23 Des 2019	Belanja makan dan minum Estimasi perubahan SAL	20.580.000	20.580.000
	Beban pajak kendaraan dinas Estimasi perubahan SAL	2.546.000	2.546.000

27 Des 2019	Kas di bendahara pengeluaran Estimasi perubahan SAL	47.127.300	47.127.300
----------------	--	------------	------------

Sumber : Data yang diolah oleh Penulis, 2021

Berikut Tabel Jurnal Penerimaan Kas yang harus dibuat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar :

Tabel 4.4
Jurnal Penerimaan Kas
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten
Kampar

Tanggal	No.	Kode Rek.	Uraian	R e f	Jumlah (Rp)	Akumulasi (Rp)
02 Des 2019			Kasda		172.534.604	172.534.604
12 Des 2019			Kasda		118.509.500	291.044.104
27 Des 2019			Kasda		47.127.300	338.171.404
			Jumlah		338.171.404	338.171.404

Sumber : Data yang diolah oleh Penulis, 2021

Kemudian Jurnal Pengeluaran Kas yang dibuat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar adalah berikut ini :

Tabel 4.5
Jurnal Pengeluaran Kas
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten
Kampar

Tanggal	No.	Kode Rek.	Uraian	R e f	Jumlah (Rp)	Akumulasi (Rp)
05 Des 2019			Biaya perjalanan dinas ke luar daerah		17.532.000	17.532.000
23 Des 2019			Biaya makan dan		20.580.000	38.112.000

			minum			
23 Des 2019			Biaya pajak kendaraan dinas operasional		2.546.000	40.658.000
			Jumlah		40.658.000	40.658.000

Sumber : Data yang diolah oleh Penulis, 2021

2. Posting ke Buku Besar

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar selanjutnya melakukan posting ke Buku Besar setelah membuat jurnal penerimaan kas dan pengeluaran kas, yaitu seperti berikut :

Tabel 4.6
Buku Besar Kas
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar
Desember 2019

Nama Akun: Kas

No. Akun:

Tanggal	Uraian	Ref	Debit(Rp)	Kredit(Rp)	Saldo(Rp)
02 Des 2019	Kas di bendahara pengeluaran		172.534.604	-	172.534.604
05 Des 2019	Biaya perjalanan dinas		-	17.532.000	155.002.604
12 Des 2019	Kas di bendahara pengeluaran		118.509.500	-	273.512.104
23 Des 2019	Biaya makan dan minum		-	20.580.000	252.932.104
23 Des 2019	Biaya pajak kendaraan dinas		-	2.546.000	250.386.104
27 Des 2019	Kas di bendahara pengeluaran		47.127.300	-	297.513.404

Sumber : Data yang diolah oleh Penulis, 2021

Tabel 4.7
Buku Besar Kasda
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar
Desember 2019

Nama Akun: Kasda

No. Akun:

Tanggal	Uraian	Ref	Debit(Rp)	Kredit(Rp)	Saldo(Rp)
02 Des 2019	Kasda		-	172.534.604	172.534.604
12 Des 2019	Kasda		-	118.509.500	291.044.104
27 Des 2019	Kasda		-	47.127.300	338.171.404

Sumber : Data yang diolah oleh Penulis, 2021

Tabel 4.8
Buku Besar Biaya Perjalanan Dinas
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar
Desember 2019

Nama Akun: Biaya Perjalanan Dinas

No. Akun:

Tanggal	Uraian	Ref	Debit(Rp)	Kredit(Rp)	Saldo(Rp)
05 Des 2019	Biaya perjalanan dinas		17.532.000	-	17.532.000

Sumber : Data yang diolah oleh Penulis, 2021

Tabel 4.9
Buku Besar Biaya Makanan dan Minuman
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar
Desember 2019

Nama Akun: Biaya Makanan dan Minuman

No. Akun:

Tanggal	Uraian	Ref	Debit(Rp)	Kredit(Rp)	Saldo(Rp)
23 Des 2019	Biaya makan dan minum		20.580.000	-	20.580.000

Sumber : Data yang diolah oleh Penulis, 2021

Tabel 4.10
Buku Besar Biaya Pajak Kendaraan Dinas Operasional
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar
Desember 2019

Nama Akun: Biaya Pajak Kendaraan Dinas Operasional					No. Akun:
Tanggal	Uraian	Ref	Debit(Rp)	Kredit(Rp)	Saldo(Rp)
23 Des 2019	Biaya pajak kendaraan dinas		2.546.000	-	2.546.000

Sumber : Data yang diolah oleh Penulis, 2021

3. Jurnal Penutup

Jurnal penutup dibuat setelah disusunnya laporan keuangan, tetapi jurnal penutup pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar belum disajikan. Jurnal penutup yang seharusnya disajikan adalah sebagai berikut :

a. Tahap I

Pendapatan Rp 0

Ikhtisar Surplus/Defisit Rp 0

b. Tahap II

Ikhtisar Surplus/Defisit Rp 8.612.333.840

Biaya Rp 8.612.333.840

c. Tahap III

Ikhtisar Surplus/Defisit Rp 18.656.251.738

Ekuitas Dana Rp 18.656.251.738

4.2.3 Laporan Keuangan Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar pada dasarnya telah membuat susunan laporan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 pada Pasal 5 Ayat (2) yang menjelaskan bahwa dalam menyusun suatu laporan keuangan memiliki komponen yaitu yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Berikut penjelasan jenis-jenis dari laporan keuangan yang telah dibuat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah suatu laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan juga pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar telah

esuai dengan format yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

2. Neraca

Neraca adalah suatu bagian dari laporan keuangan yang dapat menggambarkan posisi keuangan dari suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban pembayaran, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca yang dibuat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar telah sesuai dengan format yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan kegiatan operasional keuangan yang di dalamnya terdapat ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar telah membuat Laporan Operasional yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah suatu laporan keuangan yang di dalamnya menyajikan ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi yang langsung menambah dan mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Laporan Perubahan Ekuitas

ini juga merupakan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar telah membuat Laporan Perubahan Ekuitas yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian dari laporan keuangan yang menyajikan suatu informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan. Berikut adalah susunan Catatan atas Laporan Keuangan yang dibuat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar :

- a. Bagian pendahuluan menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD, landasan hukum dan komponen laporan keuangan yang digunakan.
- b. Menjelaskan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD.
- c. Menjelaskan tentang kebijakan akuntansi yang merupakan dasar, aturan dan praktik yang dipilih oleh suatu entitas akuntansi/pelaporan dalam penyusunan dan penyajian pada laporan keuangannya yang berkaitan dengan ketentuan yang ada.
- d. Menjelaskan tentang penjelasan akun-akun laporan keuangan yang terdapat pada Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Catatan atas Laporan Keuangan yang dibuat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar sebenarnya secara keseluruhan

telah sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, walaupun pada Catatan atas Laporan Keuangannya masih ada sedikit perbedaan dalam susunan dari setiap penjelasan. Catatan atas Laporan Keuangan ini pada intinya telah sesuai dengan fungsinya yaitu dapat memberikan informasi dan juga penjelasan dari setiap laporan keuangan agar tidak terjadi suatu kesalahpahaman oleh setiap pembaca dan juga penggunaannya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan juga pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis akan menarik kesimpulan dan memberikan beberapa saran yang akan bermanfaat.

5.1 Simpulan

1. Penerapan dalam penerimaan dan pengeluaran kas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar sudah tercatat dalam Buku Kas Umum, namun belum membuat jurnal atas transaksi tersebut.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar belum membuat jurnal penutup dan tidak melakukan posting ke Buku Besar.
3. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar belum sepenuhnya menerapkan prinsip akuntansi berterima umum dan hal ini sesuai dengan hipotesis yang telah dibuat sebelumnya oleh penulis.

5.2 Saran

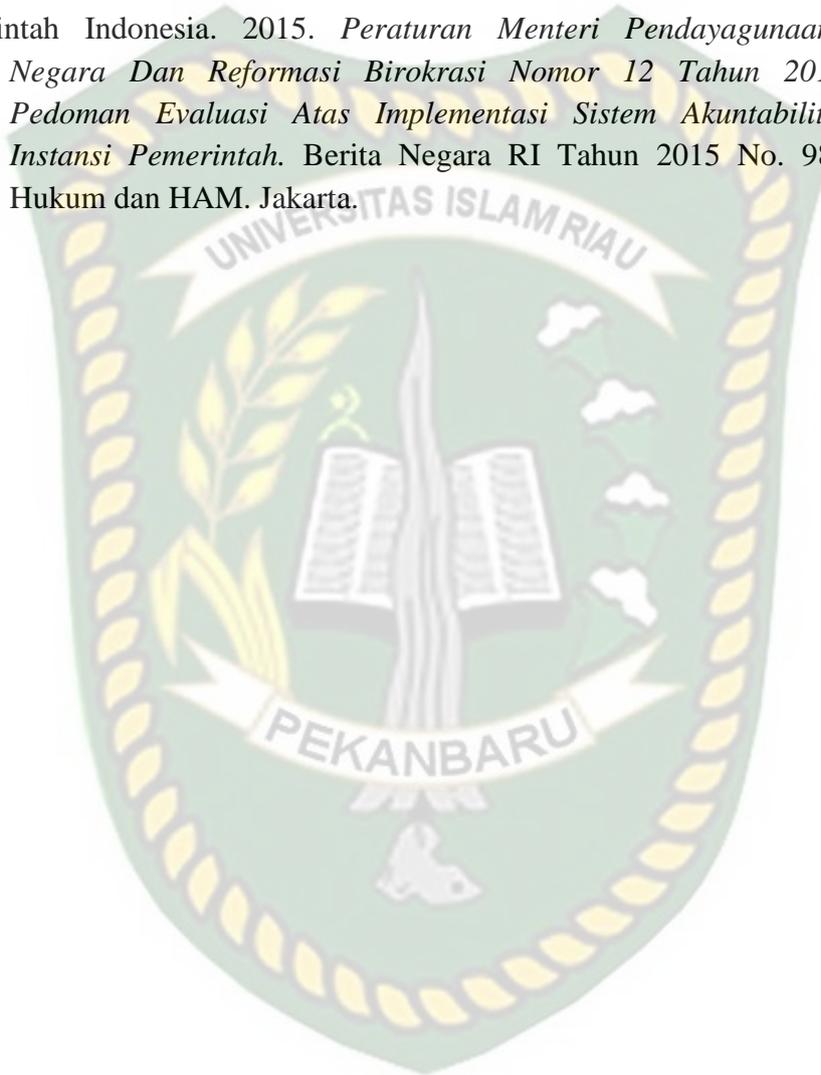
1. Sebaiknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar membuat jurnal untuk seluruh transaksi yang sering terjadi terutama pada penerimaan dan pengeluaran kas.
2. Seharusnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar membuat jurnal penutup dan melakukan posting ke Buku Besar agar laporan keuangannya dapat disajikan dengan lebih akurat.
3. Sebaiknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar berpedoman sepenuhnya pada prinsip akuntansi berterima umum dalam mengelola akuntansi keuangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Erlina, Omar Sakti Rambe, Rasdianto. 2016. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul., Muhammad Syam Kusufi. 2018. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hantono, Namira Ufrida Rahmi. 2018. *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Lubis, Arfan Ikhsan. 2017. *Akuntansi Keperilakuan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mandiri, Fokusindo. 2014. *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah*. Bandung: Fokusindo Mandiri.
- Nordiawan, Deddi., Iswahyudi S. Putra, Maulidah Rahmawati. 2012. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press Yogyakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 2005 No. 140. Menteri Hukum dan HAM. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Lembaran Negara RI Tahun 2010 No. 123. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2011. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Berita Negara RI Tahun 2011 No. 310. Menteri Hukum dan HAM. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2013. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah*. Berita Negara RI Tahun 2013 No. 1425. Menteri Hukum dan HAM. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2014. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 80. Menteri Hukum dan HAM. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2015. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Berita Negara RI Tahun 2015 No. 986. Menteri Hukum dan HAM. Jakarta.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau